

Dampak polarisasi media sosial terhadap partisipasi politik pemilih muda di Indonesia

Velani Laily Noviana

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: velaninoviana9@gmail.com

Kata Kunci:

Polarisasi media sosial; pemilih muda; partisipasi politik; literasi digital; demokrasi digital.

Keywords:

Social media polarization; young voters; political participation; digital literacy; digital democracy.

ABSTRAK

Perkembangan media sosial di Indonesia telah membawa dampak yang kompleks terhadap partisipasi politik, khususnya di kalangan pemilih muda. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana polarisasi yang terjadi di ruang digital memengaruhi kualitas keterlibatan politik pemilih muda di Indonesia. Dengan menggunakan studi kepustakaan (library research), kajian ini menelaah mekanisme polarisasi digital, pola penyebaran disinformasi, serta dampaknya terhadap perilaku politik generasi muda. Hasil kajian menunjukkan bahwa mekanisme filter bubble dan echo chamber dalam sistem platform digital mendorong terbentuknya polarisasi ideologis, afektif, dan audiens berita yang menggeser orientasi partisipasi politik pemilih muda dari rasional

reflektif menjadi reaktif dan emosional. Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya literasi digital serta masifnya penyebaran hoaks dan disinformasi yang pada akhirnya mengikis kepercayaan generasi muda terhadap lembaga demokrasi. Kajian ini merekomendasikan penguatan literasi digital, reformasi regulasi platform, revitalisasi peran lembaga demokrasi di ruang digital, serta pembaruan narasi kebangsaan berbasis nilai Pancasila sebagai strategi terpadu untuk menciptakan ekosistem politik digital yang lebih sehat dan demokratis.

ABSTRACT

The rapid growth of social media in Indonesia has brought complex implications for political participation, particularly among young voters. This study aims to analyze how polarization in the digital space affects the quality of political engagement among young Indonesian voters. Employing a library research approach, this study examines the mechanisms of digital polarization, patterns of disinformation spread, and their impact on the political behavior of the younger generation. The findings indicate that filter bubble and echo chamber mechanism embedded in platform algorithms foster ideological, affective, and news audience polarization, shifting young voters political participation from rational and reflective to reactive and emotional. This condition is exacerbated by low digital literacy and the rampant spread of hoaxes and disinformation, which ultimately erode young people's trust in formal democratic institutions. The study recommends strengthening digital literacy, reforming platform regulations, revitalizing the role of democratic institutions in digital spaces, and renewing national narratives grounded in Pancasila values as an integrated strategy to build a healthier and more democratic digital political ecosystem.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di masa kini telah menghasilkan transformasi mendasar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang politik dan demokrasi (Rahman et al., 2022). Media sosial, yang



merupakan salah satu hasil utama dari revolusi digital, telah menjadi ruang publik yang baru, tidak hanya untuk interaksi sosial, tetapi juga sebagai tempat untuk membentuk opini, menggerakkan massa, dan konflik politik. Menurut laporan *We Are Social*, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia telah mencapai 167 juta jiwa atau sekitar 60 persen dari populasi total, dengan kelompok usia 18 hingga 34 tahun menjadi pengguna terbanyak. Hal ini menunjukkan bahwa generasi muda Indonesia, terutama generasi milenial dan generasi Z merupakan pemain utama dalam ekosistem digital nasional.

Keberadaan media sosial sebagai alat komunikasi politik membawa berbagai dampak yang kompleks dan beragam. Di satu sisi, platform digital ini mampu memperluas akses terhadap informasi politik, mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembicaraan publik, dan membuka ruang partisipasi bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak terlibat dalam proses politik biasa (Yaqin, 2017). Generasi muda, yang dikenal akrab dengan teknologi digital, memiliki potensi besar untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana partisipasi politik yang berarti. Namun di sisi lain, cara kerja media sosial yang cenderung memperkuat *echo chamber* dan *filter bubble* dapat memperburuk polarisasi dalam masyarakat. Pengguna sering kali hanya menerima informasi yang sesuai dengan pandangan mereka, sehingga membentuk kelompok-kelompok opini yang seragam dan menghalangi terjadinya dialog di antara perbedaan.

Polarisasi politik yang muncul akibat dinamika media sosial di Indonesia bukan sesuatu yang baru. Sejak Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2014, Indonesia telah mengalami terbentuknya dua kutub dukungan yang sangat kuat, yang tidak hanya terjadi di kalangan elit politik, tetapi juga meresap ke dalam masyarakat umum. Persaingan yang semakin intensif dipicu oleh narasi di media sosial, termasuk penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan informasi yang salah, telah menyebabkan perpecahan sosial yang melampaui sekat-sekat politik (Zaman, 2023). Situasi ini telah berlangsung hingga Pilkada DKI Jakarta 2017, Pilpres 2019, hingga Pemilu serentak 2024, dan menunjukkan pola yang semakin mengkhawatirkan seiring berkembangnya penggunaan platform digital.

Dalam konteks tersebut, pemilih muda memiliki peran yang sangat penting namun juga rentan. Pada Pemilihan Umum 2024, kelompok usia dibawah 40 tahun mendominasi komposisi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Tingkat nasional, menjadikan suara mereka sangat berpengaruh terhadap arah politik negara. Namun, Tingkat keterlibatan mereka di ruang digital tidak selalu sejalan dengan kualitas partisipasi politik yang dihasilkan. Tingginya paparan terhadap konten-konten provokatif, sensasional, dan partisan di media sosial berisiko mengubah orientasi politik pemilih muda dari partisipasi yang rasional dan reflektif menjadi partisipasi yang cenderung reaktif, impulsif, dan emosional (Lutfi & Supriyadi, 2021).

Jurnal ini disusun dengan maksud untuk mengevaluasi dengan cermat bagaimana polarisasi yang muncul di lingkungan media sosial memengaruhi jenis dan mutu keterlibatan politik pemilih muda di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), kajian ini berupaya menggambarkan pola polarisasi digital, mengidentifikasi cara pengaruhnya terhadap tindakan politik pemilih muda, serta menyusun rekomendasi strategis untuk menciptakan ekosistem politik digital yang lebih baik, inklusif, dan demokratis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi ilmiah yang berarti bagi pengembangan literatur akademis terkait politik digital di Indonesia, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pengelolaan ruang digital yang adil.

Pembahasan

Media sosial kini telah menjadi arena utama dalam pembentukan pandangan politik di Indonesia, terutama setelah memasuki era pemilihan yang semakin kompetitif. Fenomena polarisasi di dunia digital bukan hanya sekadar perpecahan pandangan, tetapi merupakan sebuah proses yang terstruktur yang di dorong oleh sistem dari platform yang digunakan. Dalam hal ini, polarisasi media sosial dapat dipahami sebagai situasi di mana para pengguna layanan digital secara bertahap terbagi menjadi kelompok-kelompok dengan pandangan politik yang semakin berbeda, sehingga pada gilirannya mengurangi ikatan sosial dan kemampuan untuk berkomunikasi secara publik.

Tiga jenis polarisasi politik yang sering muncul di platform media sosial meliputi polarisasi ideologis, polarisasi afektif, dan polarisasi audiens berita. Polarisasi ideologis terjadi ketika pengguna media sosial hanya mengakses dan menyebarkan informasi yang sesuai dengan pandangan politik mereka. Polarisasi afektif mengacu pada meningkatnya rasa permusuhan dan ketidakpercayaan terhadap kelompok oposisi, sedangkan polarisasi audiens berita terbentuk saat pemisahan dalam konsumsi informasi menghasilkan narasi yang sangat berbeda antara satu kelompok dengan yang lain. Ketiga jenis ini muncul akibat adanya batasan informasi yang dipengaruhi oleh mekanisme filter bubble dan echo chamber dalam sistem algoritma platform digital (Armanda et al., 2025).

Filter bubble merupakan kondisi di mana sistem media sosial secara otomatis menyaring informasi yang akan ditampilkan kepada pengguna berdasarkan preferensi, riwayat pencarian, dan interaksi sebelumnya. Akibatnya pengguna hanya akan menerima konten yang sesuai dengan sudut pandang mereka dan memperkuat keyakinan yang telah ada. Di sisi lain, echo chamber menggambarkan situasi dimana individu terlibat dalam komunitas daring yang hanya terdiri dari orang-orang dengan pandangan yang sama, sehingga pandangan yang berbeda tidak diperhitungkan dan perspektif alternatif sulit untuk masuk. Fenomena ini menunjukkan bahwa dampak sistem bubble dan echo chamber secara signifikan memengaruhi perilaku dalam pengguna internet, termasuk dalam konsumsi konten politik (Wulandari et al., 2021).

Di Indonesia, perkembangan polarisasi ini mencapai titik yang mengkhawatirkan terutama sejak Pemilihan Presiden 2014. Polarisasi yang awalnya terjadi sebagai debat opini di kalangan elit politik kemudian menyebar ke masyarakat luas melalui media sosial. Pada masa pemilu 2024 dan 2019, Twitter menjadi platform yang paling menonjol, di mana istilah politis seperti “cebong” dan “kampret” muncul sebagai simbol pembagian kelompok pendukung yang saling berlawanan (Purboyo et al., 2024). Perubahan aktivitas digital di media sosial ini secara mendasar mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan politik, di mana identitas politis yang kuat dibentuk dan dipertahankan melalui dinamika percakapan digital sehari-hari.

Polarisasi yang terjadi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peran berita palsu dan disinformasi yang menyebar luas di platform digital. Data dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menunjukkan bahwa pada awal tahun 2024, terdapat 2.882 konten hoaks yang beredar di media sosial, dengan 203 di antaranya berhubungan dengan Pemilu. Di sisi lain, temuan dari Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) sepanjang 2023 mencatat lebih dari 1.100 informasi hoaks terkait pemilu yang tersebar di berbagai platform digital. Situasi ini menandakan bahwa disinformasi telah menjadi alat sistematis dalam memperkeruh suasana politik dan memperdalam polarisasi di kalangan masyarakat.

Proses penyebaran polarisasi di media sosial juga diperkuat oleh keberadaan bots dan buzzer politik yang beroperasi secara terencana. Kelompok tersebut bertugas untuk memperkuat narasi tertentu, menyerang tokoh lawan secara terkoordinasi, dan membangun ilusi konsensus kelompok yang sebenarnya tidak mencerminkan pandangan asli masyarakat. Dalam konteks Pilpres 2024, narasi serangan terhadap setiap kandidat menciptakan stereotip negatif yang sistematis: kubu Anies mendapat serangan dengan isu politik identitas, kubu Ganjar dikaitkan dengan narasi oligarki, sementara kubu Prabowo-Gibran kerap diserang dengan isu nepotisme dan konten merendahkan. Pola ini menunjukkan bahwa polarisasi di media sosial Indonesia bukanlah fenomena yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan hasil dari proses rekayasa opini yang disengaja dan terstruktur (Purboyo et al., 2024).

Dari sudut pandang identitas nasional, polarisasi yang ditimbulkan oleh media sosial menjadi ancaman serius bagi dasar persatuan negara. Identitas nasional yang kokoh seharusnya dapat bertindak sebagai pengikat untuk menyatukan berbagai perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Selain itu, identitas nasional juga berperan penting dalam meredakan konflik di tengah masyarakat. Ketika masyarakat menyadari adanya kesamaan sebagai bagian dari suatu bangsa, mereka cenderung lebih memilih untuk berdialog dan kerja sama daripada konfrontasi (Faslah, 2024). Namun, dinamika polarisasi di media sosial berfungsi sebaliknya dengan mengganggu peran identitas nasional, karena secara sistematis mendorong Masyarakat terpecah ke dalam kelompok-kelompok politik yang saling bermusuhan serta melupakan ikatan kebangsaan yang lebih luas (Ramadhani, 2025).

Partisipasi politik dari pemilih muda merupakan elemen krusial dalam dinamika demokrasi Indonesia kontemporer. Pada Pemilihan Umum 2024, kelompok usia di bawah 40 tahun menjadi mayoritas dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara nasional, menjadikan suara mereka sebagai faktor penentu dalam arah kebijakan politik negara. Hal ini menjadi fundamental untuk memahami pengaruh polarisasi yang terjadi di dunia digital terhadap perilaku politik generasi yang tumbuh dengan teknologi informasi tersebut.

Di satu sisi, media sosial terbukti memberikan pengaruh positif yang signifikan dalam mendorong partisipasi politik pemilih muda. Platform digital menciptakan ruang diskusi yang inklusif dan mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat, memungkinkan pengguna untuk bertukar berita, pendapat, dan diskusi tentang isu-isu politik secara langsung. Media sosial juga memfasilitasi individu untuk terlibat dalam

debat yang tidak mungkin mereka temui di dunia nyata, sehingga membangun komunitas yang lebih terinformasi dan aktif secara politik. Dalam konteks Indonesia, hasil survei menunjukkan bahwa minat generasi Z untuk terlibat dalam politik berada di angka 67,8 persen, yang merupakan angka cukup tinggi dan mencerminkan partisipasi aktif generasi muda dalam proses demokrasi (Judijanto et al., 2024).

Dampak negatif yang paling mengkhawatirkan dari polarisasi media sosial terhadap pemilih muda adalah pergeseran orientasi partisipasi dari yang bersifat rasional dan reflektif menjadi reaktif, impulsif, dan emosional. Tingginya paparan terhadap konten yang provoaktif, sensasional, dan partisan membuat pemilih muda mengambil keputusan politik bukan berdasarkan pertimbangan program dan visi kandidat, melainkan berdasarkan emosi kelompok dan rasa permusuhan terhadap pihak lawan (Z, 2025). Penerimaan generasi Z terhadap polarisasi politik menunjukkan bahwa banyak di antara mereka cenderung menerima dan mempertahankan polarisasi sebagai bagian dari identitas digital mereka.

Fenomena ini semakin buruk dengan rendahnya literasi digital di kalangan pemilih muda. Penyebaran hoaks dan disinformasi di media sosial terbukti lebih mudah memengaruhi pengguna yang memiliki kemampuan kritis terbatas dalam menilai informasi. Kondisi tersebut semakin diperburuk oleh ketidakpercayaan pada media besar, kecenderungan untuk menerima berita yang sejalan dengan pandangan pribadi, dan rendahnya tingkat literasi digital, khususnya di kalangan pemilih pertama kali. Kondisi ini membuat sebagian pemilih muda rentan terhadap manipulasi informasi dan lebih mudah terjebak dalam narasi politik yang merusak iklim demokrasi (Anggraini, 2025).

Dalam pandangan yang lebih luas, polarisasi yang dialami oleh pemilih muda juga berdampak pada keyakinan mereka terhadap lembaga-lembaga demokrasi. Paparan terus menerus pada narasi negatif, serangan pribadi, dan hoaks proses pemilu dapat merusak kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu, partai politik, dan lembaga negara secara keseluruhan. Kondisi ini dapat melahirkan generasi pemilih yang skeptis dan apatis terhadap sistem politik formal, meskipun mereka mungkin tetap terlibat dalam aktivisme digital yang bersifat informatif serta non-elektoral. Ketegangan antara tingginya aktivitas digital dan rendahnya kepercayaan terhadap lembaga resmi merupakan salah satu paradoks paling serius dalam dunia politik pemilih muda saat ini (Sari et al., 2024; Sarjito, 2024).

Dari sudut pandang identitas nasional, penyimpangan terhadap identitas nasional akibat pengaruh luar dapat membahayakan generasi penerus bangsa (Faslah, 2024). Generasi muda yang seharusnya menjadi penggerak kemajuan bangsa justru menjadi kelompok yang paling rentan terhadap krisis identitas karena adanya polarisasi digital. Ketika garis pembeda antara identitas kebangsaan dan identitas politik menjadi samar, keutuhan sosial yang diperlukan untuk membangun demokrasi berkelanjutan pun melemah. Oleh karena itu, penguatan literasi politik dan identitas kebangsaan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila merupakan syarat penting untuk menciptakan partisipasi politik pemilih muda yang berkualitas.

Menghadapi tantangan polarisasi media sosial yang berpengaruh pada kualitas partisipasi politik pemilih muda, diperlukan strategi pemecahan masalah yang menyeluruh dan mengakibatkan berbagai pihak. Pendekatan yang bersifat terbatas dan terfragmentasi terbukti belum cukup efektif untuk menghadapi kompleksitas serta dinamika dunia digital yang terus berkembang. Oleh karena itu, strategi yang efektif harus meliputi aspek pendidikan dan literasi digital, regulasi platform, penguatan lembaga demokrasi, serta pembentukan identitas nasional yang sesuai untuk generasi digital.

Aspek pertama yang paling penting adalah meningkatkan literasi digital dan literasi demokrasi di kalangan pemilih muda. Literasi digital yang baik tidak hanya mencakup kemampuan teknis dalam menggunakan perangkat, tetapi juga kemampuan kritis dalam menilai konten, mendeteksi hoaks, memahami cara kerja mekanisme digital, serta berpikir secara mandiri di tengah aliran informasi yang sangat deras. Media sosial menunjukkan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan partisipasi politik karena memungkinkan masyarakat memperoleh akses informasi dengan lebih mudah dan cepat. Namun, di sisi lain media sosial juga menghadirkan tantangan berupa penyebaran hoaks dan polarisasi opini yang dapat menghambat kualitas demokrasi. Oleh karena itu, literasi digital perlu diajarkan sebagai keterampilan yang tidak hanya teknis, tetapi juga sebagai kemampuan kritis yang mampu membekali pemilih muda untuk berpartisipasi secara bermartabat dalam dunia demokrasi digital (Dodi et al., 2025).

Aspek kedua adalah reformasi ekosistem digital melalui regulasi yang lebih bertanggung jawab terhadap platform. Platform media sosial yang memiliki kontrol signifikan atas mekanisme algoritma yang menyebabkan polarisasi harus didorong untuk bertanggung jawab lebih besar terhadap dampak sosial dari produk yang mereka rancang. Pemerintah perlu memperkuat regulasi yang mewajibkan platform untuk meningkatkan transparansi sistem, mengurangi penyebaran konten disinformasi, dan memberikan ruang yang cukup bagi beragam perspektif. Kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan platform digital juga diperlukan guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas terkait pengendalian informasi.

Aspek ketiga yang tidak kalah penting adalah memperkuat kapasitas partisipasi politik pemilih muda melalui saluran demokrasi yang resmi. Penggunaan media sosial seharusnya tidak menggantikan lembaga-lembaga demokrasi formal, tetapi justru memperkuat dan melengkapinya, karena media sosial pada dasarnya merupakan ruang komunikasi publik yang berpengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan termasuk politik. Dalam konteks ini, lembaga demokrasi seperti KPU, Bawaslu, partai politik, dan organisasi masyarakat sipil perlu meningkatkan relevansi dan aksesibilitas mereka kepada pemilih muda, termasuk dengan memanfaatkan saluran digital dengan cara yang lebih efektif dan kreatif.

Aspek keempat adalah revitalisasi Pancasila sebagai fondasi pengutan identitas nasional merupakan langkah penting yang tidak dapat ditunda (Faslah, 2024). Nilai-nilai dalam Pancasila yang mencakup prinsip persatuan dalam keragaman, musyawarah dan mufakat, serta keadilan sosial sesungguhnya adalah solusi yang paling sesuai untuk mengatasi polarisasi yang merugikan. Akan tetapi, narasi kebangsaan ini harus

disampaikan dengan cara yang dapat diterima oleh generasi muda, bukan dengan indoktrinasi yang kaku, melainkan melalui metode yang partisipatif, inovatif, dan berbasis pengalaman nyata, sehingga nilai-nilai tersebut menjadi hidup dan relevan dalam kehidupan sehari-hari generasi digital (Fernando et al., 2022).

Kesimpulan dan Saran

Polarisasi media sosial telah memberikan dampak yang signifikan terhadap keterlibatan politik pemilih muda di Indonesia. Melalui sistem seperti filter bubble dan echo chamber, platform digital mendorong terbentuknya polarisasi ideologis, emosional, dan audiens berita yang secara bersama-sama mengalihkan orientasi partisipasi politik pemilih muda dari yang bersifat rasional menjadi reaktif, impulsif, dan emosional. Kondisi ini semakin buruk dengan rendahnya literasi digital serta maraknya penyebaran hoaks dan disinformasi yang pada akhirnya merusak kepercayaan generasi muda terhadap lembaga-lembaga demokrasi formal dan mengaburkan identitas kebangsaan sebagai ikatan persatuan.

Berdasarkan temuan tersebut, semua pihak yang berkepentingan disarankan untuk bekerja sama dalam mengatasi tantangan polarisasi digital secara menyeluruh. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu memberikan perhatian pada peningkatan literasi digital dan demokrasi di kalangan pemilih muda, sementara platform media sosial harus didorong melalui peraturan yang lebih tegas untuk meningkatkan transparansi sistem dan mengurangi penyebaran disinformasi. Lembaga demokrasi formal seperti KPU, Bawaslu, dan partai politik juga perlu memperkuat relevansinya di ruang digital, serta narasi kebangsaan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila perlu dihidupkan kembali dengan pendekatan yang partisipatif dan relevan bagi generasi digital, sehingga ekosistem politik yang lebih sehat, inklusif, dan demokratis dapat terwujud di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Anggraini, S. I. (2025). Tantangan demokrasi Pancasila di era digital. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(11), 221–231.
- Armanda, D. M., Afaf, D., & Krisdahyanto, R. (2025). Filter Bubble dan Echo Chamber: Pengaruh Algoritma Media Sosial terhadap Pola Konsumsi Informasi Mahasiswa Universitas Lampung. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*, 2(4), 1124–1129. <https://doi.org/10.62379/jiksp.v2i4.2669>
- Dodi, D. J. W., Adam, K. D. G. H., & Amanda, N. P. (2025). Penguatan Literasi Demokrasi Digital Bagi Generasi Muda Dalam Menangkal Disinformasi Politik Di Era Media Sosial. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 7(1), 1021–1027.
- Faslah, R. (with Faslah, R.). (2024). *Identitas Nasional, geostrategi, dan geopolitik: Membangun keberlanjutan dan kedaulatan*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. <https://repository.uin-malang.ac.id/20872/>
- Fernando, Z. J., Pratiwi, W., & Saifulloh, P. P. A. (2022). Model Penanaman Nilai-Nilai Pancasila dalam Menghadapi Ancaman Polarisasi Politik Pemilu 2024 di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*, 120–132.

- Judijanto, L., Wandan, H., Ayu, N., Triyantoro, A., & Suroso, S. (2024). Pengaruh Politik Identitas dan Penggunaan Media Sosial terhadap Partisipasi Politik Digital Pemilih Milenial dan Gen Z di Indonesia. *Sanskara Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(01), 24–35. <https://doi.org/10.58812/sish.v2i01.500>
- Lutfi, M., & Supriyadi, A. P. (2021). Politik Hukum Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 Perspektif Konstitusi Ekonomi. *De Jure: Jurnal Hukum & Syariah*, 13(2), 203–221. <https://repository.uin-malang.ac.id/10076/>
- Purboyo, M. G., Junaidi, J., & Amriwan, A. (2024). Eskalasi Partisanship Politik dalam Pembentukan Polarisasi pada Masyarakat Digital: (Studi pada Platform Media Sosial TikTok). *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, 26(01), 27–45. <https://doi.org/10.23960/sosiologi.v26i01.1220>
- Rahman, A., Latifah, E. D., & Fachrurrazi, S. (2022). Peranan Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Warga Negara. *Sisfo: Jurnal Ilmiah Sistem Informasi*, 6(1), 12–24.
- Ramadhani, A. (2025). Identitas nasional sebagai karakter bangsa indonesia dalam bermedia sosial. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(6), 108–115.
- Sari, W. P., Putriana, M., Wihadi, A., Firdaus, M. R., Pamungkas, B. F., Reyfaldi, R. A., Sadewo, R., & Bachtera, R. A. (2024). Analisis Pengaruh Terpaan Media Sosial TikTok terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa dalam Pemilihan Presiden Indonesia Tahun 2024: Pendekatan Kuantitatif. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(3), 1255–1264. <https://doi.org/10.54082/jupin.512>
- Sarjito, A. (2024). Hoaks, Disinformasi, dan Ketahanan Nasional: Ancaman Teknologi Informasi dalam Masyarakat Digital Indonesia. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 6(2), 175–186. <https://doi.org/10.47650/jglp.v6i2.1547>
- Wulandari, V., Rullyana, G., & Ardiansah, A. (2021). Pengaruh algoritma filter bubble dan echo chamber terhadap perilaku penggunaan internet. *Berkala Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 17(1), 98–111. <https://doi.org/10.22146/bip.v17i1.423>
- Yaqin, M. Z. N. (2017). *Isu-isu ideologis dalam wacana berita politik terkini di media sosial*. Research Report. Fakultas Humaniora UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang <https://repository.uin-malang.ac.id/3459/>
- Z, P. R. (2025). Dampak Media Sosial Terhadap Transformasi Sosial dan Politik di Era Digital. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(3), 562–565.
- Zaman, S. (2023). *Edukasi literasi politik dan media untuk generasi muda: Kesiapan menghadapi tahun politik 2024*. <http://repository.uin-malang.ac.id/14993/>